

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesalahpahaman terhadap konsep gender dan *sex* kerap kali terjadi, maka dari itu perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan antara kedua konsep tersebut. Gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan dan istilah gender mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Adapun istilah *sex* mengacu kepada perbedaan secara biologis dan anatomis antara laki-laki dan perempuan (Mosse, 2002: 25). Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.

Kesalahpahaman akan konsep gender juga seringkali muncul, ketika konsep gender disamakan dengan konsep *sex*. Hal ini ditegaskan oleh Asma Barlah (2007: 54) yang mengatakan bahwa inti dari ketidaksetaraan gender adalah pencampur-adukan antara biologis (jenis kelamin) dan makna sosialnya (gender). Dalam setiap masyarakat, kaum laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Perbedaan pekerjaan dan perlakuan yang dibentuk secara sosial terhadap masing-masing gender. Karena adanya perbedaan ini maka terjadilah ketidaksetaraan antara satu dan lainnya.

Ketidaksetaraan menimbulkan adanya dominasi atas satu gender terhadap yang lainnya, dalam praktik di masyarakat, dikenal budaya Patriarkhi. Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Menurut Bressler pada sistem ini, ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan (Rokhimah, 2014: 133). Hal yang dihadapi oleh masyarakat sekarang adalah sebuah sistem, yaitu sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem kontrol terhadap perempuan di mana perempuan dikuasai. Melekat dalam sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan

adalah bagian dari milik laki-laki (Kamla Bashin, 1996: 4). Adanya sistem Patriarki ini semakin mempertegas hirarki gender antara laki-laki dan perempuan.

Kuatnya cengkeraman patriarkhi ini menyebabkan perempuan lebih banyak berada pada posisi marginal dan sub-ordinat dalam budaya kerja maskulin, hal ini dibentuk dari pandangan bahwa laki-laki sebagai pemimpin yang dominan, sementara perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah seolah diabaikan eksistensinya. Patriarkhi membatasi prestasi perempuan di semua lingkup kehidupan, membuat kurangnya kesempatan terhadap kekuasaan politik, pendidikan, kesehatan yang baik dan penghidupan yang layak.

Feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki (Najmah dan Khatimah, 2003: 34). Ide mengenai feminisme ini pun mulai menyebar ke seluruh dunia. Gerakan-gerakan untuk mendobrak hirarki gender menginspirasi perempuan lainnya, termasuk kaum perempuan di negara-negara Asia Timur, khususnya Jepang.

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki budaya patriarkhi sejak dahulu. Hal ini membuktikan bahwa ide mengenai gender di Asia dan Jepang secara khusus, dikonstruksi sedemikian rupa untuk membuat satu jenis kelamin menjadi lebih superior dari yang lainnya. Seperti sebuah ungkapan di Jepang yang mengkonstruksikan *stereotype* yang bias gender seperti berikut, *Otoko wa matsu, onna wa fuji, a man is a pine tree, a woman is a wisteria; a woman depends on a man just like a wisteria, a climbing plant with white or purple flowers that winds around a pine tree* (Takemaru, 2010: 3). Arti dari ungkapan tersebut adalah, laki-laki adalah pohon pinus dan perempuan adalah wisteria, perempuan bergantung pada laki-laki seperti wisteria, bunga putih atau ungu dari tanaman rambat yang bergelantungan pada pohon pinus. Ungkapan tersebut menyiratkan ide mengenai gender di Jepang telah dikonstruksikan sebagai suatu pihak yang bergantung dan menjadi beban terhadap yang lainnya.

Pada zaman Tokugawa (1603-1868), perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, khususnya pada bidang pendidikan. Tokugawa yang menganut

sistem feodal mempengaruhi struktur dan keadaan masyarakat, serta bidang pendidikan itu sendiri. Pendidikan di zaman Tokugawa diprioritaskan pada bidang militer dan pemerintahan, sehingga pendidikan untuk kaum perempuan sangat kurang. Walaupun ada pendidikan perempuan pada zaman itu, namun hanya terbatas pada pendidikan yang diberikan oleh ibunya sendiri. Dengan melihat kondisi masyarakat yang bersifat feodalistik, dapat terlihat bahwa kedudukan, peran dan hak perempuan sangat kecil. Pandangan terhadap kaum perempuan saat itu sangat diskriminatif. Seorang pengarang terkenal pada zaman Tokugawa, Kaibara Ekiken menulis sebuah buku yang berjudul *Onna Daigaku* diterbitkan pada tahun 1716. Buku ini menjadi landasan pemikiran keluarga Jepang saat itu, yang menggariskan ruang sempit kaum perempuan dalam sistem kekeluargaan tradisional pada masa itu.

Pada zaman Meiji (1868-1912) sebagai kelanjutan dari Tokugawa, bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan pun masih berlangsung. Meskipun demikian, perkembangan pendidikan perempuan di zaman Meiji mengalami perubahan yang cukup signifikan. Setelah Jepang memutuskan untuk melaksanakan politik pintu terbuka *Kaikoku* (開国), paham-paham Barat masuk dan mulai berkembang di Jepang. Terjadi perubahan-perubahan mendasar tentang kaum perempuan terhadap struktur masyarakat, keadaan dan pandangan pemerintah. Mengawali proses pembaharuan, sebagai program *Meiji Ishin* tahun 1869 dikeluarkan tiga kewajiban rakyat terhadap negara, pertama adalah *Choheirei* yaitu wajib militer, kedua, wajib membayar pajak, sedangkan yang ketiga, yang dianggap sebagai salah satu modal penting bagi pembangunan bangsa adalah wajib belajar. Pemerintah menyadari perlunya pendidikan bagi rakyat untuk meraih tujuan negara. Pendidikan diberikan kepada seluruh rakyat, dan kaum perempuan diberikan pendidikan khusus perempuan. Pada zaman Meiji tahun 1872, sistem *Gakusei* mulai diberlakukan. Sistem *Gakusei* adalah sistem pendidikan formal model Barat yang menitikberatkan pada ilmu pengetahuan Barat atau *Seiyō Teki Kyouiku*. Sistem pendidikan *Gakusei* ini menggantikan sistem pendidikan feodal (Rita, 2016: 3). Setelah Reformasi Meiji, eksploitasi perempuan dibatasi, perempuan diizinkan untuk meminta perceraian, dan kedua anak laki-laki dan anak perempuan diminta

untuk menerima pendidikan dasar (Iwasawa, 1998: 205). Jepang mulai berjalan dalam menuju kemajuan di berbagai bidang.

Secara keseluruhan, modernisasi menghasilkan homogenisasi pengalaman perempuan dalam pendidikan dan cita-cita. Pemikiran modern yang berkembang di Jepang di antaranya adalah pemikiran tentang persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Konsep persamaan hak juga disampaikan oleh para cendekiawan saat itu seperti Fukuzawa Yukichi, Mori Arinori serta Iwamoto Yoshiharu. Langkah pertama adalah dengan menggiatkan kesetaraan di bidang pendidikan. Pada masa Meiji inilah gaung-gaung feminisme pada kaum perempuan mulai muncul ke permukaan.

Feminisme di Jepang dimulai pada akhir abad ke-19 menjelang akhir periode Edo. Berdirinya negara Jepang modern di bawah pemerintahan Kaisar Meiji pada abad ke-19 membawa sejumlah perubahan, termasuk signifikansi pergerakan feminisme Jepang. Gerakan feminisme di Jepang dimulai dengan adanya gerakan para perempuan yang menuntut jaminan kebebasan hak memilih. Gerakan ini pun berkembang cepat selama 10 tahun. Pada tahun 1869, Mamichi Tsuda selaku petugas hukum pidana negara mengajukan petisi kepada pemerintah untuk melarang adanya jual-beli perempuan dan hasilnya kaum perempuan terbebas dari kasus tersebut. Di tahun 1871, Umeko Tsuda dan 4 perempuan lainnya dikirim ke Amerika Serikat untuk mempelajari paham feminisme pada *Iwakura Mission* (岩倉使節団). *Iwakura Mission* atau *Iwakura Embassy* adalah sebuah perjalanan diplomatik Jepang ke Amerika Serikat dan Eropa yang dilakukan antara 1871 dan 1873 oleh para negarawan terkemuka dan ilmuwan periode Meiji. Meskipun bukan satu-satunya misi semacam itu, ini adalah yang paling terkenal dan paling penting dalam hal pengaruhnya terhadap modernisasi Jepang setelah lama isolasi dari Barat. Tujuan misinya adalah tiga yaitu, untuk mendapatkan pengakuan atas dinasti kaisar yang baru dipulihkan di bawah Kaisar Meiji, untuk memulai renegosiasi awal perjanjian yang tidak setara dengan kekuatan dunia yang dominan dan untuk membuat kajian komprehensif tentang sistem, struktur, dan sistem industri modern, politik, militer dan pendidikan di Amerika Serikat dan Eropa (Ruxton, 1998:35). Tahun 1872, prostitusi dibebaskan tanpa syarat dan juga pada saat itu mulai didirikan sekolah untuk kaum perempuan. Tahun 1873, kaum istri mendapat hak

cerai dan dibentuk tempat praktik pelatihan keterampilan untuk kaum perempuan *Joshi Denshūjo*. Pada tahun 1874, didirikan sekolah pengajaran untuk kaum perempuan di Tokyo, *Tōkyō Joshi Shihan Gakkō* (Sri, 2014: 353). Gerakan-gerakan ini selangkah demi selangkah membawa perubahan terhadap eksistensi perempuan di berbagai bidang.

Posisi perempuan Jepang dalam sistem masyarakat terus mengalami perbaikan seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II yang membuat pasukan aliansi pimpinan Amerika Serikat menduduki Jepang dan melakukan transformasi terhadap perpolitikan Jepang. Sejak diberlakukannya Konstitusi Jepang 1947, masyarakat Jepang dijamin haknya untuk aktif berpartisipasi dalam pemerintahan, tak terkecuali kaum perempuan,

*Article 14. All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status, or family origin. Peers and peerage shall not be recognize (Chapter III: Rights and Duties of the People, Constitution of Japan 1947) (Constitute Project.org, 2018: 5).*

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa semua orang setara di bawah hukum dan tidak akan ada diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi atau sosial karena ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, atau asal keluarga. Bangsawan dan kebangsawanannya tidak akan dikenali. Jepang mulai membentuk negara dengan sistem dan konstitusi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis.

Di Jepang, kaum perempuan mulai memiliki hak suara yang perjuangan untuk mendapatkan hak suara tersebut sebenarnya telah dirintis jauh sebelum masa itu. Pada tahun 1919, sebuah organisasi politik perempuan pertama yang disebut dengan *Shin Fujin Kyōkai* dibentuk untuk menyuarakan hak-hak politik kaum perempuan, hingga kemudian perempuan diperbolehkan mengikuti organisasi-organisasi politik meskipun mereka tetap tidak memiliki hak pilih sampai dengan tahun 1946. Pada masa ini juga mulai banyak dibuka universitas khusus perempuan. Hal ini untuk memastikan kaum perempuan memiliki akses yang mudah terhadap pendidikan dan menjadi salah satu komponen penggerak sistem perpolitikan Jepang. Namun, semua itu tidak dapat dicapai tanpa perjuangan para kaum perempuan dari berbagai bidang. Merupakan sebuah perjuangan yang panjang untuk melepaskan

diri dari belenggu patriarkhi hingga akhirnya kaum perempuan Jepang dapat mencapai peran dan kedudukan yang lebih baik dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh feminisme terhadap kedudukan perempuan Jepang pasca Perang Dunia II. Penulis juga ingin mengetahui problematika yang dihadapi oleh kaum perempuan di Jepang pada masa sebelum perang dunia kedua serta sejarah perkembangan gerakan feminisme yang berkembang di Jepang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait tema penelitian :

1. Masalah yang dihadapi kaum perempuan di Jepang dari zaman Tokugawa hingga Perang Dunia II.
2. Gerakan feminisme yang berkembang di Jepang.
3. Pergeseran peran dan kedudukan perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II.

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang melebar, penulis akan membatasi penulisan dan fokus terhadap pembahasan terkait pengaruh feminisme terhadap kedudukan perempuan Jepang pasca Perang Dunia II.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana masalah yang dihadapi kaum perempuan di Jepang dari zaman Tokugawa hingga Perang Dunia II?
2. Bagaimana perkembangan gerakan feminisme di Jepang hingga pasca Perang Dunia II ?
3. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap peran dan kedudukan perempuan di Jepang pasca Perang Dunia II ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan masalah yang dihadapi kaum perempuan di Jepang dari zaman Tokugawa hingga Perang Dunia II
2. Untuk menguraikan bagaimana perkembangan gerakan feminisme di Jepang hingga pasca Perang Dunia II.
3. Untuk menganalisis perubahan yang terjadi terhadap peran dan kedudukan perempuan Jepang pasca Perang Dunia II.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2009: 29). Penulis melakukan studi kepustakaan pada Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Japan Foundation, Perpustakaan Jurusan Sastra Jepang Universitas Darma Persada, Perpustakaan Rektorat Universitas Darma Persada dan melalui koleksi pribadi penulis.

Sebagai referensi utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jurnal yang berjudul *The Japanese Woman, Traditional Image and Changing Reality* oleh Iwao Sumiko. Sumber referensi pendukung lainnya diperoleh dari jurnal-jurnal online dan sebagainya.

### **1.7 Landasan Teori**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis menggunakan teori dari beberapa ahli untuk menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini :

#### **1. Pengaruh**

Surakhmad menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya (Surakhmad, 1982:7). Menurut Badudu dan Zain pengaruh adalah,

1. Daya yang menyebabkan sesuatu terjadi
2. Sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain
3. Tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain (Badudu, Zain, 2001: 1031).

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah kekuatannya yang dapat memberikan perubahan dan dampak pada hal yang ada di sekitarnya.

## 2. Peran

Peran menurut Merton didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*) (Raho, 2007: 67). Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002: 243). Dapat disimpulkan bahwa peran adalah sekumpulan pola dan tingkah laku yang diharapkan masyarakat kepada seseorang dengan status tertentu untuk dilakukan.

## 3. Kedudukan (Status Sosial)

J. B. A. F Mayor Polak menjelaskan bahwa status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status sosial memberi bentuk dan pola pada interaksi sosial (Gunawan, 2000: 38). Kedudukan (status sosial) menurut Soerjono Soekanto adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya (Soerjono Soekanto, 1993: 239). Ralph Linton menjelaskan bahwa status memiliki dua arti, pertama, dalam pengertian abstrak (berhubungan dengan individu yang mendudukinya), status ialah suatu posisi dalam pola tertentu, kedua (tanpa dihubungkan dengan individu yang mendudukinya), secara sederhana status itu dapat dikatakan sebagai kumpulan hak-hak dan kewajiban. Kemudian dari masing-masing status sosial individu tersebut digolongkan menjadi beberapa kelompok yang disebut kelas sosial (*social class*) (Gunawan, 2000: 40). Sebagaimana Poloma mengatakan bahwa “kelas sosial adalah pengelompokan orang yang menduduki posisi sosial yang sama

sehubungan dengan kekuatan atau beberapa bentuk khusus dari kekuasaan, privilese, atau prestise yang terlembaga; orang-orang yang saling berhubungan satu sama lain karena kepentingan yang sama (misalnya, pemilikan kekayaan, uang) (Jondar dan Surbakti, 2003:59). Dapat disimpulkan bahwa kedudukan (status sosial) adalah tempat seseorang berada pada kehidupan masyarakat yang memberikan bentuk dan pola interaksi sosial.

#### 4. Gender

Menurut Mosse gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan dan ini mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Adapun istilah *sex* mengacu kepada perbedaan secara biologis dan anatomis antara laki-laki dan perempuan (Mosse, 2002: 25).

Moore mengemukakan bahwa gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Abdullah, 2003: 19).

Santrock mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan (Santrock, 2003: 365). Dapat disimpulkan bahwa gender adalah bentukan kultural yang membedakan perempuan dan laki-laki berdasarkan perilaku dan karakter emosional.

#### 5. Feminisme

Menurut June Hannam di dalam buku *Feminism*, kata feminisme bisa diartikan sebagai:

1. *A recognition of an imbalance of power between the sexes, with woman in a subordinate role to men.*
2. *A belief that woman condition is social constructed and therefore can be changed .*
3. *An emphasis on female autonomy.* ( June Hannam, 2007:22).

Dari penjelasan tersebut feminisme dapat diartikan dalam tiga hal, pertama, pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin, dengan peranan perempuan berada di bawah pria. Kedua, keyakinan bahwa kondisi perempuan terbentuk secara sosial dan maka dari itu dapat diubah. Ketiga, penekanan pada otonomi perempuan.

Menurut Shelden, secara etimologis feminis berasal dari kata *femme* (*woman*, berarti perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara *male* dan *female* (sebagai aspek perbedaan biologis, sebagai hakikat alamiah, *masculine* dan *feminine* (sebagai aspek perbedaan psikologis kultural). Dengan kalimat lain, *male-female* mengacu pada seks, sedangkan *masculine-feminine* mengacu pada jenis kelamin atau gender, sebagai *he* dan *she*, jadi tujuan feminis adalah keseimbangan, interelasi gender. Dalam pengertian yang luas, feminisme adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya (Ratna, 2007:184).

Lebih lanjut Lerner mengemukakan bahwa feminisme dapat mencakup baik gerakan hak-hak perempuan maupun emansipasi perempuan. Ia mendefinisikan kedua posisi tersebut sebagai gerakan hak-hak perempuan, berarti sebuah gerakan yang peduli dengan kemenangan bagi kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam semua aspek masyarakat dan memberi mereka akses pada semua hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang dinikmati laki-laki dalam institusi-institusi dari masyarakat tersebut (Lerner 1986: 235-237). Dapat disimpulkan bahwa feminisme adalah keyakinan bahwa kondisi perempuan terbentuk secara sosial dan sebuah gerakan untuk mengubahnya demi mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

## **1.8 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi Penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai gerakan feminsme yang berkembang di Jepang serta kedudukan kaum perempuan Jepang pasca Perang Dunia II.

### **2. Bagi Pembaca**

Memberikan informasi berkaitan dengan sejarah masyarakat Jepang dari perspektif gender.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai referensi juga untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, landasan teori, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Peran dan Kedudukan Perempuan Jepang sebelum Perang Dunia II, berisikan pembahasan mengenai latar belakang masyarakat Jepang, peran dan kedudukan kaum perempuan Jepang dan masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan dari zaman Tokugawa hingga Taisho.
3. Bab III Peran dan Kedudukan Perempuan Jepang pasca Perang Dunia II, membahas tentang keadaan kaum perempuan Jepang pasca Perang Dunia II, perkembangan gerakan feminisme di Jepang dan perubahan peran dan kedudukan perempuan yang dicapai pasca Perang Dunia II.

Bab IV Kesimpulan, bab penutup ini akaerisi tentang kesimpulan dari penelitian ini.